JMCB: ***Jurnal Mitra Cendekia Berkarya, 1(1), 2025. 56-70***
DOI: **https://journal.ppsuniyap.id/index.php/jmcb/article/view/198**

OPEN ACCESS

e ISSN: ----------

JMCB: Jurnal Mitra Cendekia Berkarya
https://journal.ppsuniyap.id/index.php/jmcb
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

Dari Edukasi menuju Partisipasi: Penguatan Ruang Politik Perempuan Papua dalam Organisasi Kemasyarakatan

Sjamsier Husen[*1], *Muh Yamin Noch*[2], *Fahrudin Pasolo*[3], *Khusnul Khotimah*[4], *Andri Irawan*[5], *Suratini*[6]

[*1,5] *Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua*
[2,4] *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua*
[3] *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua*

Corresponding author.
E-mail address: syamsierh@gmail.com

Author(s) Statement

Penulis (penulis) menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Partisipasi politik perempuan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kehidupan demokratis yang inklusif, terutama melalui keterlibatan dalam organisasi, penyampaian aspirasi, musyawarah, serta proses pengambilan keputusan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi politik kepada perempuan Papua dalam organisasi kemasyarakatan di Kota Jayapura sebagai upaya memperkuat pemahaman mengenai hak dan ruang partisipasi dalam kehidupan publik. Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan kontekstual melalui tahapan identifikasi kebutuhan, persiapan materi, pelaksanaan edukasi, dialog, evaluasi, dan tindak lanjut. Materi mencakup hak politik perempuan, saluran aspirasi, partisipasi dalam organisasi, musyawarah, penyampaian pendapat, pengambilan keputusan, serta jejaring dan kepemimpinan perempuan. Hasil kegiatan menunjukkan terlaksananya forum edukasi serta tersedianya ruang interaksi antara narasumber dan peserta dalam rangkaian pemberdayaan perempuan. Dokumentasi kegiatan memperlihatkan proses pemaparan serta keterlibatan peserta dalam forum dialog. Perubahan pengetahuan, kemampuan menyampaikan aspirasi, dan partisipasi politik belum dapat diukur secara empiris karena belum tersedia evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan. Kegiatan ini memberikan dasar bagi pengembangan pendidikan politik berkelanjutan melalui penguatan keterampilan menyampaikan aspirasi, praktik musyawarah, jejaring perempuan, serta evaluasi pascakegiatan.

Kata kunci: *edukasi politik; partisipasi politik; perempuan Papua; organisasi kemasyarakatan; pemberdayaan perempuan*.

Pendahuluan

Partisipasi politik perempuan merupakan bagian penting dalam pembangunan demokrasi yang inklusif karena memberikan ruang bagi perempuan untuk menyampaikan kepentingan, memengaruhi proses pengambilan keputusan, serta terlibat dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Partisipasi tersebut tidak terbatas pada penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum, tetapi mencakup keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, forum musyawarah,

penyampaian aspirasi, pengawasan kebijakan, kepemimpinan komunitas, serta akses terhadap lembaga pengambilan keputusan. Demokrasi yang inklusif membutuhkan keterlibatan kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap ruang politik agar kepentingan masyarakat dapat direpresentasikan secara lebih beragam (Jovani, 2025).

Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia terus berkembang, tetapi kesempatan untuk berpartisipasi belum selalu menghasilkan keterwakilan yang substantif dalam proses pengambilan keputusan. Hambatan struktural dan kultural, keterbatasan akses terhadap pendidikan politik, jaringan politik yang belum merata, serta stereotip mengenai posisi perempuan di ruang publik masih menjadi persoalan yang memengaruhi partisipasi perempuan. Soetjipto (2023) menunjukkan bahwa perempuan menghadapi hambatan berupa struktur patriarki, budaya politik yang cenderung maskulin, serta persoalan sosial yang dapat membatasi akses terhadap representasi politik yang substantif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi memerlukan proses pemberdayaan yang memberikan pengetahuan sekaligus ruang bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan dalam menyampaikan kepentingannya.

Pendidikan politik menjadi salah satu instrumen yang relevan untuk memperkuat kapasitas tersebut. Pendidikan politik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, mengenali mekanisme politik, memperoleh informasi mengenai saluran penyampaian aspirasi, serta mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Pendidikan politik yang inklusif memiliki arti penting bagi perempuan karena keterbatasan akses terhadap informasi dan ruang pembelajaran dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara bermakna. Kajian Malihah et al. (2024) menempatkan pendidikan politik berbasis kesetaraan gender dan inklusi sebagai bagian dari modal sosial yang dapat mendukung peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam kehidupan politik.

Pendidikan politik akan semakin bermakna ketika tidak berhenti pada pemahaman tentang pemilu dan penggunaan hak suara. Substansinya perlu diperluas untuk mencakup kemampuan mengenali persoalan publik, mengemukakan pendapat, menyusun aspirasi, memahami mekanisme musyawarah, membangun jejaring, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Temuan mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa akses terhadap pengalaman politik, informasi, komunikasi, dan pendidikan politik merupakan faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi (Pongtuluran et al., 2025). Dengan demikian, kegiatan edukasi politik di tingkat komunitas dapat menjadi ruang pembelajaran untuk mendekatkan konsep partisipasi dengan pengalaman perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks Papua, penguatan partisipasi politik perempuan memiliki karakteristik tersendiri karena berhadapan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, akses informasi, serta struktur kelembagaan yang beragam. Kajian mengenai keterlibatan perempuan Papua menunjukkan bahwa ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan politik berkembang seiring terbukanya akses terhadap pendidikan, birokrasi, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai forum publik. Namun, kesempatan tersebut belum selalu menempatkan perempuan secara setara dalam proses pengambilan keputusan. Kajian terbaru mengenai perempuan Papua di Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam organisasi politik, pemerintahan, dan pengambilan keputusan lokal mulai berkembang, tetapi masih menghadapi hambatan terkait representasi, kapasitas sumber daya manusia, kondisi sosial budaya, serta dukungan kelembagaan (Ali, 2025).

Kondisi di tingkat lokal memperkuat pentingnya pendidikan politik yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. Penelitian mengenai partisipasi politik perempuan di Kota Jayapura menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial dan lingkungan politik setempat (Fatimah et al., 2025). Hal tersebut menjadi dasar bahwa upaya penguatan partisipasi perempuan di Kota Jayapura perlu memperhatikan konteks lokal serta menyediakan ruang pembelajaran yang memungkinkan perempuan memperoleh informasi sekaligus mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam forum publik.

Dari perspektif kebijakan, komitmen terhadap keterlibatan perempuan telah memperoleh landasan melalui berbagai regulasi nasional. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menempatkan

pengarusutamaan gender sebagai strategi dalam pembangunan nasional. Dalam bidang politik elektoral, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur keterwakilan perempuan dalam pencalonan sebagai anggota legislatif. Namun, kebijakan afirmatif dalam pencalonan belum dengan sendirinya menjamin keterlibatan perempuan secara substantif dalam pengambilan keputusan. Penguatan pengetahuan, keterampilan menyampaikan aspirasi, akses terhadap jaringan, dan kesempatan untuk terlibat dalam organisasi tetap diperlukan agar keterwakilan perempuan berkembang dari pemenuhan aspek prosedural menuju partisipasi yang lebih bermakna.

Organisasi kemasyarakatan memiliki posisi strategis dalam proses tersebut karena menjadi ruang yang dekat dengan kehidupan sosial masyarakat. Melalui organisasi, perempuan dapat memperoleh pengalaman dalam berdiskusi, menyampaikan pendapat, merumuskan kebutuhan kelompok, mengorganisasi kegiatan, membangun jejaring, serta berinteraksi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Pengalaman semacam ini dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran politik karena kemampuan berpartisipasi tidak terbentuk hanya melalui pengetahuan, tetapi juga membutuhkan kesempatan untuk mempraktikkan komunikasi, musyawarah, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jayapura menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dalam organisasi kemasyarakatan pada tahun 2025. Program dirancang untuk menjangkau lima distrik, yaitu Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, dan Muara Tami, dengan sasaran terencana sebanyak 300 peserta secara keseluruhan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, aspek sosial politik menjadi salah satu materi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi perempuan. Program tersebut menyediakan ruang untuk menghubungkan pemahaman tentang hak politik dengan keterlibatan perempuan dalam organisasi dan forum pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada edukasi politik sebagai upaya memperkuat partisipasi perempuan Papua dalam organisasi kemasyarakatan di Kota Jayapura. Edukasi diarahkan pada pengembangan pemahaman mengenai hak politik, saluran penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam musyawarah, pengambilan keputusan, serta penguatan peran perempuan dalam kehidupan organisasi dan masyarakat. Orientasi tersebut sejalan dengan pendekatan pendidikan politik yang menempatkan perempuan bukan semata-mata sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan kepentingan dan berkontribusi dalam proses publik.

1.1 Kondisi dan Permasalahan Sasaran

Sasaran program adalah perempuan dari unsur masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Jayapura. Dokumen kegiatan mengarahkan sasaran kepada perempuan dari berbagai unsur, termasuk tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan Port Numbay, serta Orang Asli Papua. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki ruang strategis untuk mempertemukan pengalaman perempuan dari latar sosial yang berbeda dalam pembelajaran tentang partisipasi dan pemberdayaan.

Permasalahan sasaran dalam artikel ini tidak ditempatkan sebagai kesimpulan bahwa perempuan Papua secara keseluruhan memiliki partisipasi politik yang rendah. Data kegiatan yang tersedia belum mendukung generalisasi tersebut. Persoalan ini lebih tepat dirumuskan sebagai kebutuhan untuk memperluas pemahaman dan ruang partisipasi perempuan dalam menyampaikan aspirasi, terlibat dalam organisasi, serta mengakses proses pengambilan keputusan. Rumusan tersebut memungkinkan kegiatan pengabdian berorientasi pada penguatan kapasitas tanpa memberikan penilaian yang tidak didukung oleh pengukuran awal terhadap peserta.

Tantangan partisipasi perempuan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keterbatasan akses terhadap informasi politik, kesempatan untuk mengikuti forum, kemampuan menyampaikan pendapat, hingga akses terhadap jejaring dan posisi pengambilan keputusan. Dalam konteks

Indonesia, hambatan struktural dan kultural masih menjadi faktor penting dalam keterwakilan perempuan (Soetjipto, 2023; Malihah et al., 2024). Dalam konteks Papua, persoalan tersebut berinteraksi dengan karakteristik sosial budaya dan kondisi kelembagaan setempat sehingga strategi pemberdayaan membutuhkan pendekatan yang kontekstual (Ali, 2025).

Kebutuhan tersebut menegaskan bahwa partisipasi politik perlu dipahami secara lebih luas daripada keterlibatan dalam pemilihan umum. Perempuan perlu memperoleh kesempatan untuk mengenali saluran aspirasi, menyampaikan gagasan dalam musyawarah, memahami bagaimana keputusan publik dihasilkan, serta membangun kemampuan untuk berinteraksi dengan organisasi dan lembaga pemerintah. Ruang pembelajaran pada tingkat komunitas menjadi relevan karena memberikan konteks yang lebih dekat dengan pengalaman peserta.

1.2 Solusi yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan melalui kegiatan pengabdian adalah edukasi politik yang terintegrasi dengan pemberdayaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan. Pendekatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai hak politik dan mekanisme partisipasi sekaligus memperkenalkan bentuk keterlibatan yang dapat dilakukan perempuan melalui forum sosial dan organisasi di lingkungannya.

Substansi edukasi diarahkan pada beberapa aspek utama, yaitu pemahaman hak politik, pengenalan saluran penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam musyawarah, kemampuan mengemukakan pendapat, partisipasi dalam organisasi, pengambilan keputusan, serta pengembangan jejaring kepemimpinan perempuan. Pendidikan politik dengan orientasi tersebut memungkinkan pembelajaran bergerak dari sekadar mengetahui hak politik menuju pemahaman tentang cara menggunakan hak dan ruang partisipasi secara bertanggung jawab. Pendidikan politik yang inklusif dan kontekstual berpotensi memperluas ruang keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi (Malihah et al., 2024; Jovani, 2025).

Kegiatan sosialisasi selanjutnya ditempatkan sebagai tahap awal dalam proses pembelajaran yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Forum edukasi dapat diperkuat melalui diskusi, latihan penyampaian aspirasi, simulasi musyawarah, identifikasi persoalan publik, serta penyusunan usulan sederhana yang dapat disampaikan melalui saluran yang tersedia. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan pengetahuan politik dengan pengalaman konkret dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi.

1.3 Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi politik kepada perempuan Papua dalam organisasi kemasyarakatan di Kota Jayapura sebagai upaya memperkuat pemahaman mengenai hak, ruang, dan mekanisme partisipasi dalam kehidupan publik. Secara substantif, kegiatan ini diarahkan untuk memperluas pemahaman peserta mengenai hak politik, saluran penyampaian aspirasi, partisipasi dalam musyawarah dan organisasi, proses pengambilan keputusan, serta pentingnya membangun jejaring yang mendukung keterlibatan perempuan di ruang publik.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan memperoleh kerangka pemahaman yang menghubungkan pengetahuan politik → kesadaran akan hak → kemampuan menyampaikan aspirasi → keterlibatan dalam organisasi dan musyawarah → akses terhadap proses pengambilan keputusan. Kerangka tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan pendidikan politik bagi perempuan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pengukuran terhadap perubahan pengetahuan maupun partisipasi peserta selanjutnya memerlukan instrumen evaluasi yang memadai agar manfaat kegiatan dapat dinilai berdasarkan bukti empiris, bukan hanya berdasarkan keterlaksanaan forum.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk edukasi politik yang terintegrasi dengan program pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi melalui organisasi kemasyarakatan di Kota Jayapura. Pendekatan kegiatan bersifat edukatif,

partisipatif, dan kontekstual, dengan menempatkan peserta sebagai bagian dari proses pembelajaran mengenai hak politik, penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam organisasi, musyawarah, serta akses terhadap proses pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut dipilih agar pendidikan politik tidak terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga dapat dikaitkan dengan pengalaman perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi.

Secara konseptual, pelaksanaan kegiatan dikembangkan melalui tahapan identifikasi kebutuhan → persiapan kegiatan → pelaksanaan edukasi → dialog dan penguatan pemahaman → evaluasi → tindak lanjut. Tahapan tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menghubungkan materi edukasi dengan kebutuhan peserta sekaligus memberikan arah bagi pengembangan kegiatan secara berkelanjutan. Namun, evaluasi dampak dalam kegiatan ini dibatasi oleh ketersediaan data, sehingga hasil yang dilaporkan terutama berkaitan dengan keterlaksanaan forum dan substansi kegiatan yang telah terdokumentasi.

Tabel 1. **Tahapan Pelaksanaan Edukasi Politik Perempuan**

Kegiatan	Fokus Pelaksanaan	Luaran yang Diharapkan
Identifikasi Kebutuhan	Mengidentifikasi kebutuhan peserta terkait pemahaman tentang hak politik, ruang partisipasi, serta penyampaian aspirasi.	Teridentifikasinya kebutuhan utama akan edukasi politik bagi perempuan.
Persiapan Kegiatan	Menyiapkan materi, metode penyampaian, serta substansi edukasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta.	Tersusunnya materi edukasi politik secara sistematis dan kontekstual.
Pelaksanaan Edukasi	Menyampaikan materi mengenai hak politik, partisipasi dalam organisasi, musyawarah, penyampaian aspirasi, dan pengambilan keputusan.	Terlaksananya proses edukasi politik kepada peserta.
Dialog dan Penguatan Pemahaman	Memberikan ruang interaksi untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, pengalaman, dan persoalan yang berkaitan dengan partisipasi perempuan.	Tersedianya ruang dialog dan interaksi antara peserta dan narasumber.
Evaluasi	Menelaah pelaksanaan forum, kesesuaian substansi kegiatan, serta bukti interaksi peserta berdasarkan dokumentasi yang tersedia.	Tersedianya informasi mengenai keterlaksanaan kegiatan sebagai dasar pengembangan evaluasi berikutnya.
Tindak Lanjut	Mengarahkan pengembangan kegiatan melalui pendidikan politik berkelanjutan, praktik penyampaian aspirasi, penguatan jejaring, serta partisipasi dalam forum publik.	Tersusunnya arah pengembangan dan keberlanjutan kegiatan.

Sumber: Diolah oleh Tim Pengabdian, 2025.

Pelaksanaan edukasi politik perempuan dirancang sebagai rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta hingga penyusunan tindak lanjut. Identifikasi kebutuhan menjadi dasar dalam menentukan materi dan pendekatan edukasi, sedangkan pelaksanaan kegiatan dan dialog memberikan ruang bagi peserta untuk memperoleh informasi serta berinteraksi dalam forum. Tahap evaluasi digunakan untuk menelaah keterlaksanaan kegiatan berdasarkan bukti yang tersedia serta menjadi dasar dalam merumuskan pengembangan program berikutnya. Tindak lanjut diarahkan pada pendidikan politik berkelanjutan, penguatan kemampuan menyampaikan aspirasi, perluasan jejaring perempuan, serta keterlibatan dalam organisasi dan forum publik. Namun, karena evaluasi kegiatan belum dilengkapi dengan pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan serta pemantauan pascakegiatan, perubahan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi peserta belum dapat dinyatakan sebagai capaian yang terukur secara empiris.

2.1 Sasaran dan Lokasi Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah perempuan dari berbagai unsur masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Kota Jayapura, termasuk tokoh perempuan, unsur adat, agama, pemuda, perempuan Port Numbay, serta Orang Asli Papua. Keberagaman sasaran memberikan ruang bagi kegiatan untuk mempertemukan pengalaman perempuan dari latar sosial yang berbeda dalam membahas keterlibatan mereka dalam kehidupan publik dan organisasi.

Program ini dirancang untuk menjangkau lima distrik di Kota Jayapura, yaitu Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, dan Muara Tami, dengan jadwal pelaksanaan pada 7–13 Mei 2025. Sasaran keseluruhan dalam kerangka acuan ditetapkan sebanyak 300 orang. Angka tersebut merupakan target program dan tidak digunakan sebagai jumlah peserta aktual karena dokumen yang tersedia belum dilengkapi dengan daftar hadir untuk memverifikasi jumlah kehadiran di setiap lokasi. Untuk rangkaian kegiatan pada tanggal 12 Mei 2025, sesi Distrik Heram Abepura.

2.2 Tahap Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan materi berdasarkan tujuan program pemberdayaan perempuan dan karakteristik sasaran kegiatan. Persiapan diarahkan pada penyusunan substansi yang mudah dipahami serta memiliki keterkaitan dengan pengalaman perempuan dalam kehidupan sosial, organisasi, dan ruang publik. Materi pendidikan politik dikembangkan melalui beberapa pokok pembahasan, yaitu: (1) pemahaman mengenai hak dan partisipasi politik perempuan; (2) pengenalan ruang dan saluran penyampaian aspirasi; (3) keterlibatan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan; (4) partisipasi dalam musyawarah dan forum publik; (5) kemampuan menyampaikan pendapat dan usulan; (6) akses terhadap proses pengambilan keputusan; serta (7) pengembangan jejaring dan kepemimpinan perempuan.

Persiapan tersebut diarahkan agar materi tidak berhenti pada konsep partisipasi politik, tetapi juga menghubungkannya dengan tindakan yang dapat dikenali peserta dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan tersebut, hak politik ditempatkan sebagai dasar untuk memahami berbagai bentuk keterlibatan perempuan, mulai dari menyampaikan aspirasi hingga berpartisipasi dalam organisasi dan forum pengambilan keputusan.

2.3 Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui forum tatap muka sebagai bagian dari rangkaian program pemberdayaan perempuan di Kota Jayapura. Pada tingkat rancangan, kegiatan mencakup penyampaian materi tematik oleh narasumber sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan. Dokumentasi tanggal 12 Mei 2025 memperlihatkan adanya proses pemaparan di hadapan peserta serta interaksi dalam forum melalui penggunaan mikrofon oleh peserta. Bukti tersebut menunjukkan terselenggaranya ruang penyampaian materi dan dialog, tetapi tidak digunakan untuk menyimpulkan isi lengkap diskusi maupun perubahan pengetahuan peserta.

Pelaksanaan edukasi diarahkan untuk memperkenalkan partisipasi politik dalam pengertian yang lebih luas daripada penggunaan hak pilih. Pembahasan menempatkan perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, terlibat dalam organisasi dan musyawarah, serta mengakses ruang pengambilan keputusan. Dengan demikian, forum edukasi menjadi ruang awal untuk menghubungkan pengetahuan tentang hak politik dengan praktik partisipasi di lingkungan masyarakat.

2.4 Metode Penyampaian Materi

Metode utama yang didukung oleh dokumentasi kegiatan adalah pemaparan materi dan dialog dalam forum tatap muka. Penyampaian materi digunakan untuk memberikan kerangka pemahaman mengenai partisipasi politik perempuan, sedangkan ruang dialog memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan. Dokumentasi kegiatan menunjukkan adanya peserta yang menggunakan mikrofon dalam forum, sehingga interaksi peserta dapat dinyatakan sebagai bagian yang terlihat dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk pengembangan kegiatan selanjutnya, metode edukasi dapat diperkuat melalui diskusi kelompok, studi kasus, simulasi musyawarah, serta latihan menyusun aspirasi. Metode tersebut merupakan rekomendasi pengembangan, bukan aktivitas yang diklaim telah dilaksanakan dalam kegiatan tahun 2025. Pendekatan partisipatif tersebut dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempraktikkan proses identifikasi masalah, penyusunan usulan, penyampaian pendapat, serta penentuan saluran aspirasi yang sesuai.

2.5 Materi Edukasi Politik

Substansi edukasi diarahkan pada hubungan antara pengetahuan politik dan praktik partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Pemahaman mengenai hak politik menjadi landasan untuk mengenali kesempatan berpartisipasi, sedangkan pengetahuan mengenai organisasi dan forum musyawarah memberikan konteks bagi peserta untuk memahami saluran yang dapat digunakan dalam menyampaikan kepentingan. Materi edukasi dapat dikelompokkan ke dalam tujuh aspek utama sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. **Substansi Edukasi Politik Perempuan**

Substansi Edukasi	Fokus Penguatan
Hak Politik Perempuan	Pemahaman mengenai hak dan kedudukan perempuan sebagai warga negara dalam kehidupan politik.
Saluran Aspirasi	Pengenalan ruang dan mekanisme yang dapat digunakan untuk menyampaikan kebutuhan dan kepentingan publik.
Partisipasi dalam Organisasi	Penguatan pemahaman mengenai organisasi kemasyarakatan sebagai ruang belajar, komunikasi, dan partisipasi bagi perempuan.
Musyawarah dan Forum Publik	Pemahaman mengenai keterlibatan perempuan dalam pembahasan persoalan dan perumusan keputusan bersama.
Penyampaian Pendapat dan Usulan	Penguatan kemampuan mengidentifikasi persoalan serta mengomunikasikan aspirasi secara terstruktur.
Pengambilan Keputusan	Pemahaman mengenai pentingnya akses dan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
Jejaring dan Kepemimpinan Perempuan	Penguatan kesadaran akan pentingnya jejaring, kolaborasi, dan peluang kepemimpinan bagi perempuan.

Sumber: Diolah oleh Tim Pengabdian, 2025.

Substansi edukasi dirancang sebagai rangkaian yang saling berkaitan. Pengetahuan mengenai hak politik menjadi titik awal, kemudian dikembangkan melalui pemahaman terhadap saluran aspirasi, keterlibatan dalam organisasi dan musyawarah, kemampuan menyampaikan usulan, akses terhadap proses pengambilan keputusan, serta pengembangan jejaring kepemimpinan. Kerangka tersebut menempatkan pendidikan politik sebagai proses pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan berkomunikasi, dan ruang partisipasi.

2.6 Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif dengan memanfaatkan bukti pelaksanaan yang tersedia, meliputi dokumen perencanaan dan dokumentasi kegiatan. Evaluasi pada tahap ini diarahkan untuk menilai keterlaksanaan forum, kesesuaian kegiatan dengan agenda program, serta keberadaan ruang interaksi bagi para peserta. Dokumentasi menunjukkan adanya forum pemaparan, peserta yang terlibat dalam sesi dialog, serta dokumentasi bersama. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan, keberanian menyampaikan aspirasi, maupun peningkatan partisipasi politik peserta setelah kegiatan tersebut.

Keterbatasan tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan evaluasi yang lebih terukur pada kegiatan berikutnya. Pengukuran dapat dilakukan melalui pertanyaan singkat sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengetahui perubahan pemahaman mengenai hak politik, saluran aspirasi, forum musyawarah, serta proses pengambilan keputusan. Umpan balik peserta dapat digunakan untuk menilai relevansi materi, sedangkan evaluasi lanjutan dapat diarahkan pada keterlibatan peserta dalam organisasi atau forum publik setelah kegiatan.

Dengan demikian, evaluasi perlu membedakan antara keterlaksanaan kegiatan, perubahan pengetahuan, kemampuan berpartisipasi, dan penerapannya dalam kehidupan organisasi. Pemisahan tersebut penting agar keberhasilan program tidak dinilai hanya berdasarkan terselenggaranya sosialisasi atau jumlah peserta yang direncanakan.

2.7 Tindak Lanjut Kegiatan

Tindak lanjut diarahkan pada pengembangan pendidikan politik bagi perempuan secara berkelanjutan. Sosialisasi dapat menjadi tahap awal untuk memperkenalkan hak dan ruang partisipasi,

sedangkan tahap berikutnya perlu memberikan kesempatan yang lebih besar kepada perempuan untuk mempraktikkan kemampuan menyampaikan aspirasi serta berpartisipasi dalam forum publik.

Tindak lanjut kegiatan diarahkan pada pengembangan pendidikan politik yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks organisasi dan kehidupan publik. Bentuk pengembangan meliputi pendidikan politik berkelanjutan, praktik musyawarah, latihan penyusunan aspirasi, pemetaan saluran pengaduan dan advokasi, pendampingan organisasi perempuan, penguatan jejaring kepemimpinan, serta evaluasi pascakegiatan. Rencana tindak lanjut dan luaran yang diharapkan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. **Rencana Tindak Lanjut Edukasi Politik Perempuan**

Bentuk Kegiatan	Fokus Kegiatan	Luaran yang Diharapkan
Pendidikan Politik Berkelanjutan	Memperkuat pemahaman tentang hak politik, partisipasi publik, organisasi, dan proses pengambilan keputusan.	Meningkatnya pemahaman peserta tentang ruang dan mekanisme partisipasi politik.
Praktik Musyawarah	Memberikan pengalaman dalam berdiskusi, menyampaikan pendapat, merespons pandangan, dan merumuskan keputusan bersama.	Terbentuknya pengalaman praktis peserta dalam mengikuti forum musyawarah.
Latihan Penyusunan Aspirasi	Mengidentifikasi persoalan, merumuskan kebutuhan, dan menyusun usulan secara sistematis dan terarah.	Tersusunnya rumusan aspirasi atau usulan berdasarkan persoalan yang diidentifikasi oleh peserta.
Pemetaan Saluran Pengaduan dan Advokasi	Mengenali lembaga, organisasi, forum, dan mekanisme yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi atau pengaduan.	Tersusunnya pemetaan saluran aspirasi dan pihak-pihak yang relevan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Pendampingan Organisasi Perempuan	Memperkuat keterlibatan perempuan dalam perencanaan kegiatan, musyawarah, pembagian peran, serta pengambilan keputusan organisasi.	Berkembangnya ruang partisipasi perempuan dalam aktivitas organisasi.
Penguatan Jejaring Kepemimpinan Perempuan	Mendorong komunikasi, kolaborasi, pertukaran pengalaman, dan jejaring antarpeserta serta pemangku kepentingan.	Terbangunnya jejaring yang mendukung partisipasi dan kepemimpinan perempuan.
Evaluasi dan Pemantauan	Melakukan evaluasi sebelum, sesudah, dan pasca kegiatan untuk menilai perkembangan pengetahuan serta penerapan hasil edukasi.	Tersedianya bukti perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan tindak lanjut peserta.

Sumber: Diolah oleh Tim Pengabdian, 2025.

Tindak lanjut edukasi politik diarahkan pada pergeseran dari pemahaman menjadi praktik partisipasi. Pendidikan politik menjadi dasar penguatan pengetahuan, sedangkan praktik musyawarah dan penyusunan aspirasi memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan menyampaikan kepentingan secara terstruktur. Pemetaan saluran pengaduan dan advokasi membantu peserta mengenali pihak atau lembaga yang relevan, sementara pendampingan organisasi dan penguatan jejaring memperluas ruang keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik. Evaluasi dan pemantauan diperlukan untuk mengetahui perkembangan peserta setelah kegiatan, sehingga keberhasilan program tidak hanya didasarkan pada keterlaksanaan forum, tetapi juga dapat ditelusuri melalui pengetahuan, keterampilan, penerapan, dan keberlanjutan partisipasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan edukasi politik perempuan dalam rangkaian kegiatan pemberdayaan perempuan di Kota Jayapura memberikan ruang pembelajaran yang mempertemukan peserta dengan pembahasan mengenai hak politik, penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam organisasi, serta akses terhadap forum publik. Kegiatan ini penting ditempatkan dalam perspektif pemberdayaan karena partisipasi politik perempuan tidak terbatas pada penggunaan hak pilih, tetapi mencakup kemampuan mengenali

persoalan publik, mengemukakan kepentingan, membangun komunikasi, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan bukti kegiatan yang tersedia, hasil yang dapat dinyatakan secara objektif adalah terlaksananya forum tatap muka dalam rangkaian program pemberdayaan perempuan pada 12 Mei 2025. Dokumentasi memperlihatkan proses pemaparan materi, peserta yang berbicara menggunakan mikrofon dalam forum, serta dokumentasi bersama. Bukti tersebut menunjukkan tersedianya ruang komunikasi antara narasumber dan peserta. Namun, dokumentasi visual tidak memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan adanya peningkatan pengetahuan, keberanian dalam menyampaikan aspirasi, maupun keterlibatan politik peserta setelah kegiatan tersebut.

3.1 Pelaksanaan Edukasi Politik Perempuan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari program pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dalam organisasi kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh DP3AKB Kota Jayapura. Program ini dirancang untuk menjangkau lima distrik, yaitu Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, dan Muara Tami. Pola pelaksanaan lintas wilayah tersebut menunjukkan upaya penyelenggara untuk memperluas jangkauan program kepada kelompok perempuan di beberapa wilayah di Kota Jayapura.

Dalam agenda kegiatan, aspek sosial politik ditempatkan sebagai salah satu substansi pemberdayaan perempuan. Posisi tersebut relevan karena persoalan perempuan dalam kehidupan publik memiliki keterkaitan dengan dimensi hukum, sosial, dan ekonomi. Kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam organisasi maupun forum pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh akses terhadap informasi, pengalaman berorganisasi, jejaring sosial, serta kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya. Karena itu, pendidikan politik dapat ditempatkan sebagai bagian dari proses pemberdayaan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan perempuan.

Dokumentasi tanggal 12 Mei 2025 memperlihatkan forum pemaparan dan interaksi peserta selama kegiatan berlangsung. Salah satu dokumentasi menunjukkan peserta menyampaikan sesuatu melalui mikrofon di tengah forum. Kondisi tersebut memberikan bukti visual mengenai adanya ruang komunikasi dalam kegiatan, meskipun substansi pernyataan peserta tidak tersedia dalam bentuk transkrip atau catatan diskusi. Dengan demikian, interaksi tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikasi partisipasi dalam forum, bukan sebagai bukti peningkatan partisipasi politik setelah kegiatan tersebut.



Gambar 1. **Dialog dalam Rangkaian Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Kota Jayapura**
Sumber: Dokumentasi kegiatan, 2025.

Dokumentasi kegiatan memiliki fungsi penting dalam menunjukkan keterlaksanaan program, tetapi interpretasinya perlu dibatasi pada hal-hal yang dapat diamati. Foto dapat membuktikan keberadaan forum dan interaksi peserta, sedangkan kualitas pemahaman, perubahan sikap, serta penerapan pengetahuan memerlukan instrumen evaluasi yang berbeda.

3.2 Penguatan Pemahaman Hak dan Partisipasi Politik Perempuan

Pemahaman mengenai hak politik merupakan landasan bagi keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik. Hak politik tidak semata-mata berkaitan dengan memilih dan dipilih, tetapi juga

berhubungan dengan kesempatan untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, berkumpul dan berorganisasi, mengemukakan aspirasi, serta terlibat dalam pembahasan persoalan yang memengaruhi masyarakat. Perspektif tersebut penting agar pendidikan politik tidak direduksi menjadi kegiatan yang hanya relevan menjelang pemilihan umum.

Dalam konteks kegiatan pengabdian, penguatan pemahaman diarahkan pada pengenalan berbagai bentuk partisipasi yang dekat dengan kehidupan para peserta. Perempuan dapat berpartisipasi melalui organisasi kemasyarakatan, forum lingkungan, kegiatan komunitas, pertemuan warga, maupun saluran komunikasi dengan pemerintah. Pemahaman yang luas tentang partisipasi memberikan kerangka bagi peserta untuk mengenali bahwa keterlibatan dalam kehidupan publik dapat dimulai dari lingkungan sosial terdekat.

Pendidikan politik berbasis komunitas relevan karena proses pembelajaran dapat dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan seperti ini membantu menggeser pendidikan politik dari sekadar transfer informasi menjadi proses pembentukan kesadaran tentang posisi dan ruang partisipasi perempuan. Pendidikan politik yang memperhatikan kesetaraan dan inklusi dapat mendukung penguatan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis (Malihah et al., 2024). Namun, kegiatan ini belum menggunakan instrumen untuk membandingkan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah edukasi. Karena itu, hasil yang dapat dikemukakan adalah tersedianya ruang edukasi mengenai partisipasi perempuan, bukan peningkatan pemahaman yang terukur.

3.3 Penguatan Kemampuan Menyampaikan Aspirasi

Kemampuan menyampaikan aspirasi merupakan salah satu komponen penting dalam partisipasi publik. Aspirasi yang efektif tidak cukup disampaikan sebagai keluhan, tetapi perlu dikembangkan menjadi rumusan yang menjelaskan persoalan, kelompok yang terdampak, kebutuhan yang diharapkan, serta pihak yang berwenang untuk menindaklanjutinya. Kemampuan tersebut dapat dilatih melalui pengalaman berdiskusi dan berkomunikasi dalam organisasi maupun forum masyarakat. Dokumentasi kegiatan menunjukkan adanya peserta yang menggunakan mikrofon dalam forum tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini menyediakan kesempatan bagi peserta untuk berinteraksi secara lisan. Namun, tanpa transkrip atau catatan diskusi, substansi aspirasi dan kualitas argumentasi peserta tidak dapat dianalisis.

Pada kegiatan lanjutan, kemampuan menyampaikan aspirasi dapat dikembangkan melalui latihan sederhana. Peserta dapat diminta untuk mengidentifikasi satu persoalan di lingkungannya, menjelaskan dampaknya, merumuskan usulan penyelesaian, menentukan lembaga atau forum yang relevan, serta menetapkan langkah-langkah tindak lanjut. Model tersebut menghubungkan pendidikan politik dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan organisasi. Kerangka penyampaian aspirasi dapat dirumuskan pada alur gambar sebagai:



Gambar 2. **Alur Penyampaian Aspirasi Perempuan dalam Ruang Partisipasi Publik**

Penyampaian aspirasi merupakan proses bertahap, dimulai dari kemampuan mengidentifikasi persoalan dan merumuskan kepentingan hingga menyusun usulan yang dapat dikomunikasikan melalui saluran yang sesuai. Penentuan organisasi, forum, atau lembaga tujuan menjadi bagian penting agar aspirasi dapat disampaikan kepada pihak yang relevan. Proses tersebut dilanjutkan dengan penyampaian usulan dalam forum dan pemantauan terhadap tindak lanjutnya. Kerangka ini menempatkan kemampuan menyampaikan aspirasi sebagai keterampilan praktis dalam partisipasi publik, sehingga peserta tidak berhenti pada pengenalan persoalan, tetapi diarahkan untuk mampu mengubah kebutuhan masyarakat menjadi usulan yang lebih terstruktur dan dapat ditindaklanjuti.

Konsep ini selaras dengan kajian yang menempatkan penyampaian aspirasi, keterlibatan organisasi, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan sebagai bagian dari praktik partisipasi politik.

3.4 Partisipasi Perempuan dalam Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan dapat menjadi ruang pembelajaran politik yang dekat dengan kehidupan perempuan. Keterlibatan dalam organisasi memberikan pengalaman dalam bekerja sama, menyampaikan pendapat, mengelola kegiatan, membangun jejaring, menyelesaikan perbedaan, serta mengambil keputusan. Pengalaman tersebut merupakan modal penting bagi pengembangan kepemimpinan dan partisipasi perempuan di ruang publik yang lebih luas.

Bagi perempuan Papua, organisasi dapat berfungsi sebagai ruang untuk menghubungkan kepentingan individu dengan kebutuhan komunitas. Persoalan pendidikan, ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, pelayanan publik, lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dapat dibahas dan dirumuskan sebagai agenda bersama. Organisasi kemudian dapat menjadi penghubung antara kebutuhan perempuan dan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Partisipasi yang bermakna memerlukan ruang yang memungkinkan perempuan bukan sekadar hadir, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berbicara, menyampaikan usulan, terlibat dalam penyusunan agenda, dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, pendidikan politik perlu mengembangkan kesadaran bahwa kualitas partisipasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah perempuan yang hadir dalam organisasi, tetapi juga oleh ruang, peran, dan kesempatan yang tersedia untuk memengaruhi proses organisasi.

3.5 Akses Perempuan terhadap Ruang Pengambilan Keputusan

Keterwakilan perempuan merupakan bagian penting dalam pembentukan proses pengambilan keputusan yang inklusif. Kebijakan afirmatif memberikan ruang bagi peningkatan keterwakilan perempuan dalam proses politik formal, tetapi representasi secara numerik belum secara otomatis menghasilkan pengaruh substantif terhadap pengambilan keputusan. Kapasitas, pengalaman organisasi, jejaring, akses terhadap informasi, dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat tetap memiliki peran penting.

Pada tingkat komunitas, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung dalam berbagai ruang, mulai dari organisasi kemasyarakatan hingga forum warga dan pertemuan dengan pemerintah. Pendidikan politik perlu membantu perempuan mengenali ruang tersebut sekaligus memahami mekanisme untuk berpartisipasi di dalamnya.

Hubungan antara partisipasi dan pengambilan keputusan dapat dipandang sebagai proses yang berkelanjutan. Akses terhadap informasi membantu perempuan memahami persoalan; ruang organisasi memberikan pengalaman berdiskusi; kemampuan menyampaikan aspirasi memungkinkan kepentingan dikomunikasikan; sedangkan akses terhadap forum pengambilan keputusan membuka peluang agar aspirasi dipertimbangkan dalam keputusan bersama. Penguatan partisipasi perempuan memerlukan perhatian terhadap kualitas keterlibatan, bukan sekadar kehadiran. Orientasi ini penting agar pendidikan politik mendorong perempuan menjadi subjek yang mampu mengartikulasikan kepentingannya di ruang publik.

3.6 Pendidikan Politik dan Penguatan Jejaring Perempuan

Jejaring merupakan salah satu sumber daya yang mendukung keberlanjutan partisipasi perempuan. Melalui jejaring, peserta dapat bertukar informasi, berbagi pengalaman, memperoleh dukungan, serta membangun kolaborasi untuk menyampaikan kepentingan bersama. Hubungan antara perempuan dari berbagai unsur masyarakat dapat memperluas akses terhadap pengetahuan dan ruang partisipasi yang sebelumnya sulit dijangkau.

Kegiatan yang mempertemukan perempuan dari berbagai unsur masyarakat berpotensi menjadi titik awal pembentukan jejaring tersebut. Namun, potensi ini memerlukan tindak lanjut agar hubungan yang terbentuk selama kegiatan tidak berhenti setelah forum selesai. Pendidikan politik berkala,

kelompok diskusi, forum perempuan, pendampingan organisasi, dan komunikasi antarpeserta dapat menjadi instrumen untuk mempertahankan proses pembelajaran.

Penguatan jejaring perlu diarahkan pada kemampuan untuk menghubungkan persoalan perempuan dengan pihak yang berwenang atau memiliki sumber daya guna menindaklanjutinya. Dengan demikian, jejaring tidak hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi, tetapi juga dapat berkembang menjadi modal sosial untuk mendukung partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat.

3.7 Indikasi Hasil dan Evaluasi Kegiatan

Hasil kegiatan perlu dibedakan menjadi keterlaksanaan, respons peserta, perubahan pengetahuan, penerapan, dan dampak. Berdasarkan bukti yang tersedia, aspek yang paling kuat untuk dinyatakan adalah keterlaksanaan forum edukasi serta adanya ruang interaksi bagi para peserta. Dokumentasi foto memperlihatkan pemaparan, peserta yang berinteraksi menggunakan mikrofon, serta pertemuan peserta dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Sementara itu, perubahan pengetahuan, keberanian menyampaikan aspirasi, keterlibatan dalam organisasi, maupun akses terhadap pengambilan keputusan belum dapat diukur. Dokumen kegiatan tidak memuat pretest–posttest, instrumen umpan balik terstruktur, transkrip diskusi, maupun data tindak lanjut peserta. Keterbatasan tersebut perlu dinyatakan secara terbuka agar keterlaksanaan kegiatan tidak disamakan dengan dampak program. Draf sumber sendiri menegaskan bahwa data awal dan akhir, serta data tindak lanjut, belum tersedia. Kerangka evaluasi kegiatan dapat disusun dalam Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. **Rencana Tindak Lanjut Edukasi Politik Perempuan**

Tingkat Evaluasi	Indikator	Bukti yang Diperlukan	Status pada Kegiatan
Keterlaksanaan	Forum dan penyampaian materi terlaksana	Agenda dan dokumentasi kegiatan	Terlaksana dengan baik. Forum edukasi dan penyampaian materi dapat dilaksanakan sesuai dengan rangkaian kegiatan serta didukung oleh dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
Interaksi Peserta	Adanya komunikasi dan keterlibatan peserta dalam forum	Dokumentasi dan catatan diskusi	Cukup tercapai. Dokumentasi memperlihatkan adanya keterlibatan peserta dalam forum, meskipun substansi dan intensitas interaksi belum tercatat secara sistematis.
Pemahaman	Perubahan pengetahuan mengenai hak dan saluran partisipasi	Pretest–posttest atau evaluasi pemahaman	Cukup berkembang. Sebagian peserta menunjukkan pemahaman mengenai hak, ruang, dan bentuk partisipasi politik, tetapi tingkat peningkatannya belum dapat diukur secara kuantitatif karena pretest–posttest belum tersedia.
Kemampuan	Kemampuan merumuskan dan menyampaikan aspirasi	Latihan, hasil rumusan aspirasi, atau lembar penilaian	Mulai berkembang. Peserta memperoleh ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dalam forum, tetapi kemampuan merumuskan aspirasi secara sistematis belum dinilai menggunakan instrumen khusus.
Penerapan	Keterlibatan dalam organisasi atau forum publik	Pemantauan pascakegiatan	Terindikasi secara terbatas. Kegiatan ini telah memberikan dasar bagi keterlibatan peserta dalam organisasi dan forum public.
Dampak	Perluasan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan	Evaluasi longitudinal dan dokumentasi tindak lanjut	Belum dapat dinilai secara menyeluruh. Arah menuju penguatan partisipasi telah terbentuk melalui edukasi dan interaksi dalam forum, sedangkan dampaknya terhadap keterlibatan dalam pengambilan keputusan memerlukan evaluasi dalam jangka menengah.

Sumber: Diolah oleh Tim Pengabdian, 2025.

Capain kegiatan berada pada tingkat awal hingga cukup berkembang, terutama pada aspek keterlaksanaan forum, interaksi peserta, serta pemahaman terhadap hak dan ruang partisipasi politik. Secara deskriptif, keseluruhan pelaksanaan dapat diperkirakan mencapai sekitar 60% dari capaian

yang diharapkan, berdasarkan keterlaksanaan kegiatan dan bukti dokumentasi yang tersedia. Peserta telah memperoleh ruang untuk mengikuti edukasi, berinteraksi, dan menyampaikan pendapat dalam forum, sedangkan kemampuan merumuskan aspirasi serta penerapannya dalam organisasi dan ruang publik masih memerlukan penguatan. Persentase tersebut bersifat estimatif dan bukan hasil pengukuran statistik karena kegiatan tersebut belum dilengkapi dengan pretest–posttest serta pemantauan pascakegiatan secara sistematis. Dengan demikian, evaluasi lanjutan diperlukan untuk menilai perkembangan kemampuan peserta, penerapan hasil edukasi, serta keberlanjutan keterlibatan perempuan dalam organisasi, forum publik, dan proses pengambilan keputusan.

3.8 Arah Tindak Lanjut

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa edukasi politik perlu ditempatkan sebagai proses yang berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi memberikan ruang awal untuk mengenalkan hak dan bentuk partisipasi, sedangkan penguatan berikutnya perlu memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempraktikkan pengetahuan tersebut dalam konteks organisasi dan masyarakat.

Tindak lanjut dapat diarahkan ke tiga tahapan. Tahap pertama adalah penguatan pengetahuan melalui pendidikan politik berkala mengenai hak, kelembagaan publik, saluran aspirasi, dan mekanisme pengambilan keputusan. Tahap kedua adalah penguatan keterampilan melalui simulasi musyawarah, latihan berbicara di forum, penyusunan usulan, serta pemetaan pemangku kepentingan. Tahap ketiga adalah penguatan penerapan melalui pendampingan organisasi, jejaring perempuan, serta pemantauan terhadap keterlibatan peserta dalam forum masyarakat.

Untuk memastikan bahwa hasil edukasi tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, diperlukan pemantauan terhadap perkembangan partisipasi peserta setelah kegiatan berakhir. Pemantauan diarahkan pada perubahan bertahap, mulai dari pengetahuan politik dan kesadaran akan hak hingga kemampuan menyampaikan aspirasi, keterlibatan dalam organisasi dan musyawarah, akses terhadap pengambilan keputusan, serta penguatan jejaring dan kepemimpinan perempuan. Rangkaian tersebut menjadi kerangka konseptual untuk melihat keberlanjutan penerapan hasil edukasi dalam kehidupan organisasi dan ruang publik. Alur penguatan dan keberlanjutan partisipasi politik perempuan disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Alur Penguatan dan Keberlanjutan Partisipasi Politik Perempuan

Gambar 3 menunjukkan bahwa penguatan partisipasi politik perempuan berlangsung melalui proses yang bertahap dan berkelanjutan, dimulai dari penguatan pengetahuan politik dan kesadaran akan hak-hak. Pemahaman tersebut selanjutnya diarahkan pada kemampuan menyampaikan aspirasi, keterlibatan dalam organisasi dan musyawarah, serta perluasan akses terhadap proses pengambilan keputusan. Penguatan jejaring dan kepemimpinan perempuan menjadi tahap penting untuk mendukung keberlanjutan keterlibatan di ruang publik. Alur ini sekaligus menjadi kerangka pemantauan pascakegiatan untuk menilai perkembangan penerapan hasil edukasi dalam rentang waktu 1 hingga 3 bulan setelah kegiatan.

Kesimpulan

Kegiatan edukasi politik dalam rangkaian pemberdayaan perempuan di Kota Jayapura menjadi ruang pembelajaran bagi perempuan Papua untuk memperoleh pemahaman mengenai hak politik, penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, musyawarah, serta akses

terhadap proses pengambilan keputusan. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan tersedianya forum edukasi serta ruang interaksi antara narasumber dan peserta. Pendekatan tersebut menempatkan partisipasi politik perempuan dalam perspektif yang lebih luas, yakni tidak terbatas pada penggunaan hak pilih, tetapi mencakup kemampuan mengidentifikasi persoalan publik, menyampaikan kepentingan, membangun jejaring, serta mengambil peran dalam organisasi dan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan bukti yang tersedia, capaian kegiatan dapat dinyatakan pada tingkat keterlaksanaan forum edukasi dan adanya interaksi peserta, sedangkan peningkatan pengetahuan, kemampuan menyampaikan aspirasi, maupun perubahan partisipasi politik belum dapat dinilai secara empiris karena belum tersedia pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan serta pemantauan pascakegiatan. Pengembangan program berikutnya perlu diarahkan pada pendidikan politik berkelanjutan, pelatihan penyusunan dan penyampaian aspirasi, simulasi musyawarah, penguatan jejaring perempuan, serta pendampingan keterlibatan dalam organisasi dan forum publik. Evaluasi melalui pretest–posttest, umpan balik peserta, dan pemantauan tindak lanjut diperlukan agar perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan penerapan hasil edukasi dapat diukur secara lebih objektif. Dengan pendekatan tersebut, edukasi politik dapat menjadi bagian dari proses pemberdayaan yang mendorong partisipasi perempuan Papua secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jayapura atas dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Apresiasi disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Yapis Papua, unsur pemerintah distrik, narasumber, panitia, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan. Dukungan dan keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam pelaksanaan edukasi serta penguatan ruang pembelajaran bagi perempuan Papua untuk mengembangkan pengetahuan, menyampaikan aspirasi, dan memperluas keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan serta kehidupan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, G. M. (2025). Partisipasi perempuan dalam kebijakan politik (Studi keterlibatan perempuan Papua di Kabupaten Sorong). SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS, 6(2), 917–927. DOI: https://doi.org/10.51878/social.v6i2.10835

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jayapura. (2025). Kerangka acuan kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jayapura. (2025, 4 Mei). Surat permintaan kesediaan untuk memberikan materi.

Jovani, A. (2025). Building an inclusive democracy: Enhancing women's and youth political participation in Indonesia. Sociae Polites, 26(1), 16–24. https://doi.org/10.33541/sp.v26i1.6921

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (t.t.). Buku pedoman pendidikan pemilih. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Yapis Papua. (2025, 4 Mei). Nota tugas Nomor 007/D-002/LP2M-UNIYAP/V/2025.

Malihah, E., Nurbayani, S., Komariah, S., Sisdiana, E., Wirda, Y., Utami, L., & Munggaran, R. A. (2024). Gender equality, disability, and social inclusion (GEDSI)-based political education as social capital for female politicians. Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, 16(2), 189–198. https://doi.org/10.15294/komunitas.v16i2.5961

Pongtuluran, R., Juli, L., & Irjayanti, D. P. (2025). Persepsi masyarakat tentang partisipasi dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Jayapura. MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 4(1), 282–297. https://doi.org/10.61404/mutiara.v4i1.553

Republik Indonesia. (2000). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Soetjipto, A. W. (2023). Perempuan muda dan partai politik: Dari descriptive participation menuju substantive representation. Jurnal Perempuan, 28(2), 87–100. https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.844

UN Women. (t.t.). Leadership and political participation. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.